

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



LAPORAN TINDAK LANJUT LHE APIP 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta wewenang dinas dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Laporan Kinerja ini merupakan cermin dari realisasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Tahun 2026 menjadi momentum strategis karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2026-2029 yang selaras dengan visi Gubernur Kalimantan Timur, yaitu “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”.

Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja tahun 2026 tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Besar harapan kami, laporan ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi untuk mendorong tercapainya pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Samarinda, 9 Juli 2026



Armin, S.Pd, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 197001231199702 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3 Struktur Organisasi	5
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	6
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	8
1.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	9
1.3.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	17
1.4 Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kerja Perangkat Daerah	18
BAB II	23
PERENCANAAN KINERJA	23
2.1. Perencanaan Strategis	23
2.1.1 Visi	23
2.1.2 Misi	24
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	25
2.1.4 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	27
2.2 Indikator Kinerja Utama	39
2.3 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	49
BAB II	47
AKUNTABILITAS KINERJA	52
3.1 Analisis Capaian Kerja	52
3.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Triwulan I	53
3.3 Realisasi Anggaran	78
BAB IV	85
PENUTUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada Peraturan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2026-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2026-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 19);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026–2029;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2026 – 2029;

29. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46).

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 54 Tahun 2016 PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan untuk asas otonomi dan tugas pembantuan, yakni:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pendidikan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah luar biasa;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah kejuruan Perguruan Tinggi;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan non formal dan informal;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan untuk asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan menjalankan fungsi sebagai berikut:

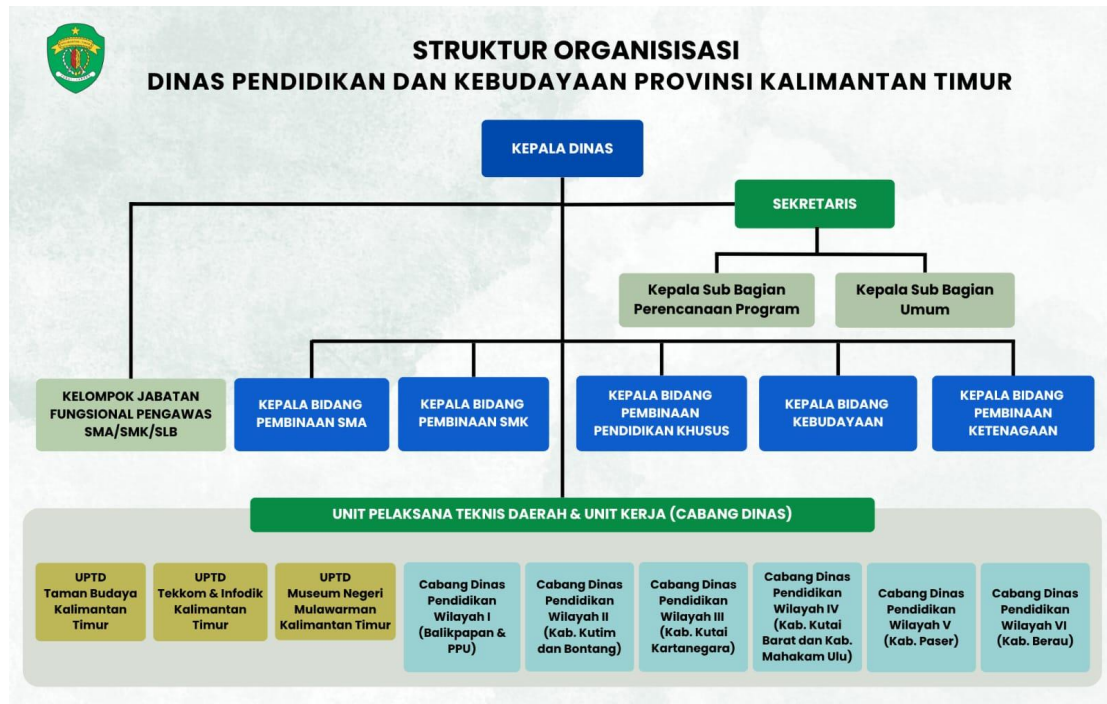
- **Perumusan Kebijakan :** Merumuskan kebijakan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- **Pelaksanaan Kebijakan :** Melaksanakan kebijakan daerah yang telah ditetapkan.
- **Pembinaan :** Melakukan pembinaan kepada perangkat daerah di bawahnya dan masyarakat dalam lingkup tugasnya.
- **Pengendalian :** Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program kerja.
- **Pengawasan :** Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
- **Penyelenggaraan Administrasi :** Menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan pembinaan aparatur sipil negara.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan Program;
 - 2) Subbagian Umum; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Kebudayaan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Cabang Dinas; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
2. Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun

2023 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada bagan berikut:



Gambar 1 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 184 memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kebudayaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
- perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengarahan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sekolah menengah atas;
- perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang sekolah menengah kejuruan;

- f. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kebudayaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
- g. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengarahan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sekolah menengah atas;
- j. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang sekolah menengah kejuruan;
- k. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan khusus;
- l. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- m. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang ketenagaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan kebudayaan;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, bidang kebudayaan dan bidang pembinaan ketenagaan;
- o. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- p. pelaksanaan Cabang Dinas;
- q. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- r. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- s. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program kerja berdasarkan rencana strategis Gubernur sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana program yang telah ditetapkan dan kebijakan;
- c. membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengendalikan urusan persuratan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
- f. mengendalikan urusan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan;

- g. mengendalikan sarana dan prasarana kantor yang meliputi pengadaan dan pengelolaan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Gubernur baik tertulis maupun lisan.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- d. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya; dan
- e. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan berdasarkan program kerja Setda serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada kesekretariatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada kesekretariatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengendalikan urusan persuratan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. menyelenggarakan fasilitasi pelanggaran disiplin terhadap pegawai berdasarkan permasalahan hukum yang dialami untuk mendapatkan penyelesaian;
- g. mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi kehumasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas baik tertulis maupun lisan.

1.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian

(1) Subbagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan Program mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional /program kerja Subbagian perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan/kegiatan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- f. melaksanakan pengelolaan/kegiatan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- g. melakukan koordinasi dan penyusunan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kebutuhan dinas;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

(1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan rencana operasional/program kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan/kegiatan kepegawaian berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- f. melaksanakan pengelolaan/kegiatan kepegawaian berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- g. melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan rencana umum pengadaan barang dan jasa dengan instansi terkait berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kebutuhan dinas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana dengan instansi terkait berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kebutuhan dinas;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pembinaan sekolah menengah atas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan kurikulum dan penilaian SMA;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kelembagaan dan sarana prasarana SMA;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis peserta didik dan pembangunan karakter SMA;
- f. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyusunan kurikulum dan penilaian SMA, kelembagaan dan sarana prasarana SMA dan peserta didik dan pembangunan karakter SMA; dan
- h. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan program kerja Gubernur serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan rancangan kebijakan mengenai kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran program kerja;
- f. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas terhadap pegawai berdasarkan permasalahan mengenai kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter yang dialami untuk mendapatkan inovasi guna efektivitas dan peningkatan kualitas kinerja;

- g. mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi yang terkait dengan bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan kegiatan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan (SMK);
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, perencanaan program bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis penyusunan kurikulum dan penilaian SMK;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kelembagaan dan sarana prasarana SMK;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis peserta didik dan pembangunan karakter SMK;
- f. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyusunan kurikulum dan penilaian SMK, kelembagaan dan sarana prasarana SMK dan peserta didik dan pembangunan karakter SMK; dan
- h. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan RENSTRA serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan rancangan bidang SMK sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan bidang SMK;
- f. mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi bidang SMK sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi kinerja;
- g. mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi bidang SMK sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi kinerja;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pembinaan pendidikan khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan pendidikan khusus;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan perencanaan program pembinaan bidang pendidikan khusus;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis penyusunan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
- f. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pembinaan pendidikan khusus;

- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyusunan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus dan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan; dan
- h. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang pembinaan pendidikan khusus berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan rancangan kebijakan teknis pengelolaan kebudayaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan;
- f. merumuskan rancangan kebijakan teknis pengelolaan kebudayaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan;
- g. mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi informasi publik di lingkungan Pemerintah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

(1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kebudayaan;

- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan perencanaan program bidang kebudayaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis cagar budaya dan permuseuman;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis sejarah dan tradisi;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kesenian; dan
- f. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang kebudayaan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kesenian; dan
- h. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang kebudayaan berdasarkan program kerja Setda serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan rancangan kebijakan teknis pengelolaan kebudayaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan;
- f. menyelenggarakan fasilitasi pengawasan dan mediasi terhadap pegawai berdasarkan permasalahan yang dialami untuk mendapatkan penyelesaian masalah;
- g. mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi informasi publik di lingkungan Pemerintah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pembinaan ketenagaan SMA, SMK, pendidikan khusus dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan ketenagaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan perencanaan program bidang pembinaan ketenagaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis ketenagaan SMA dan pendidikan khusus;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis ketenagaan SMK;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis ketenagaan kebudayaan; dan
- f. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pembinaan ketenagaan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan pendidikan khusus, pendidik dan tenaga kependidikan SMK dan tenaga kebudayaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja Bidang Pembinaan Ketenagaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan rancangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran;
- f. menyelenggarakan fasilitasi terhadap pegawai berdasarkan permasalahan yang dialami;
- g. dokumentasi dan layanan informasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

1.3.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Provinsi Kalimantan Timur, maka prioritas Pembangunan Pendidikan senantiasa diarahkan dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional yang bertumpu pada tiga pilar pendidikan yaitu:

1. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan;
2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan;
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

Sesuai dengan misi pembangunan pendidikan nasional, maka Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Rencana Strategis PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur 2024-2026 diarahkan pada isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum meratanya Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
2. Daya saing keluaran satuan Pendidikan yang masih rendah
3. Pelaksanaan Kurikulum Dual Track
4. Konsistensi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mengalokasikan Anggaran Pendidikan minimal 20%
5. Dilaksanakannya secara sungguh-sungguh Peraturan Daerah (PERDA) tentang strategi dan kebijakan pendidikan, yang menjadi acuan dan payung hukum penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur.
6. Dibuatnya Grand Design Pendidikan Kalimantan Timur yang memuat arah dan strategi operasional kebijakan pendidikan yang melibatkan seluruh stakeholders Pendidikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Leading Sector.
7. Dituntaskannya Wajib Belajar 9 tahun dan mengoptimalkan kembali Wajib Belajar 12 Tahun di Seluruh Wilayah Kalimantan Timur.
8. Terpenuhinya akses bagi masyarakat hingga usia wajib belajar 12 tahun (SMA/SMK/MA).

9. Peningkatan Kualifikasi, Kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang berpatokan pada standar nasional pendidikan.
10. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang SMA/SMK/SLB.
11. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap harus dilakukan termasuk didalamnya melengkapi sarana pembelajaran pada semua jenjang satuan pendidikan.
12. Reformasi Perbukuan yang bertujuan untuk meningkatkan daya baca masyarakat dalam menuju Reading Society dalam kerangka Learning Society.
13. Tersedianya sarana pendidikan berkeunggulan lokal, nasional dan internasional.
14. Pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan secara periodik, tidak hanya pada proses tetapi juga luaran satuan pendidikan pada semua jenjang.
15. Sistem rewards bagi peserta didik dan tenaga kependidikan harus dilakukan dengan memberikan penghargaan yang layak dan sesuai bagi mereka yang berprestasi.
16. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan harus dijaga dan diaktifkan, khususnya dalam bidang pendidikan luar sekolah.
17. Dilakukannya kualifikasi dan sertifikasi sesuai dengan skema tenaga budaya melalui pelatihan maupun sertifikasi.
18. Ditingkatkannya sarana pementasan budaya diberbagai tempat sehingga layanan ekspresi budaya terpenuhi

Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur diarahkan pada sistem pendidikan yang berorientasi kualitas, dan bukan kuantitas semata. Secara global, sistem pendidikan, database pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, peserta didik dan pengendali mutu lulusan serta peran serta masyarakat merupakan unsur-unsur yang harus ditata dan diperhatikan secara bersamaan dalam penyelenggaraan pendidikan.

1.4 Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Kalimantan Timur memiliki 173 pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 12 Orang
3. Eselon IV : 22 Orang
4. Pejabat fungsional : 138 Orang

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berada dalam kondisi **belum ideal**. Sehingga, kedepannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individu pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak **173 orang** dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Sarjana S-3 : 3 Orang
2. Sarjana S-2 : 35 Orang
3. Sarjana S-1 : 67 Orang
4. Diploma 4 : 3 Orang
5. Diploma 3 : 9 Orang
6. SMA Sederajat : 43 Orang
7. SMP Sederajat : 9 Orang
8. SD Sederajat : 4 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang **S1**, yang mencerminkan kesiapan / **keterbatasan** dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karir berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 1 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 42 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 47 Orang
4. Usia $\geq$ 50 tahun : 83 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia $\geq$ 50 tahun mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini **menunjukkan** perhatian **dalam perencanaan pensiun dan penggantiannya**. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Aset Tetap			98.560
1	Tanah	√		8
2	Peralatan dan Mesin	√		23.023
3	Gedung dan Bangunan	√		26
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	√		48
5	Aset Tetap Lainnya	√		75.435
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√		20
II	Aset Lainnya			32
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-
2	Aset Tidak Berwujud	√		21
3	Aset Lain-lain	√		11

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur** berada dalam kondisi **layak guna**, baik karena tidak ada

kerusakan fisik, tidak ada yang melampaui usia pakai batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini tidak berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, tidak diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan **aset yang masih layak**, **penghapusan aset tidak layak**, tetapi masih diperlukannya **pengadaan sarana baru** secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

Tabel.2 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindaklanjuti
1	Perencanaan Kinerja: - Agar Rencana aksi kinerja dapat dilaksanakan secara optimal serta dilakukan pemantauan secara berkala oleh pimpinan.	- Telah dilaksanakannya rapat internal untuk monitoring dan evaluasi di triwulannya, data dukungnya berupa notulen kegiatan ataupun laporan kegiatan
2	Pengukuran Kinerja : - Agar Pengukuran Kinerja dapat dijalankan secara optimal untuk meningkatkan capaian penilaian secara optimal.	- Menyusun rencana aksi disetiap bidang sampai ke level sub kegiatan dan melakukan monitoring dan evaluasi di setiap triwulannya agar kinerja yang belum tercapai secara optimal dapat di ketahui masalah dan merumuskan Upaya atau Solusi. - Data dukungnya berupa dokumen rencana aksi atau sistem kerja - Berita Acara atau notulen dari Rapat Pengendalian Operasi Kegiatan
3	Pelaporan Kinerja : - Agar informasi dalam laporan kinerja dapat menginformasikan upaya	- Melaksanakan rapat internal pembahasan analisis kebutuhan prioritas berdasarkan skala

No	Rekomendasi	Tindaklanjuti
	perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) lebih baik dari tahun sebelumnya dalam periode RENSTRA yang sama; - Agar informasi dalam laporan kinerja dilaksanakan dan menjadi perhatian utama pimpinan dan digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi dan penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja ; - Agar informasi dalam laporan kinerja dapat dilaksanakan secara optimal dan digunakan dalam penyesuaian anggaran, mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mempengaruhi perubahan budaya kerja.	prioritas.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ; - Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dapat dilaksanakan pada seluruh Bidang/Sub bidang/Staf dan seluruh unit kerja/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara berjenjang.	- Melakukan rapat koordinasi dialog kinerja di Triwulan I untuk mengevaluasi Akuntabilitas kinerja setiap Bidang/Sub bidang/Staf - Data Dukung matrik sistem kerja setiap Bidang/Sub bidang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD Tahun 2024 – 2026 adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Demikian pula dalam hal ini Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan arahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu perencanaan strategis dapat menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya serta menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.1 Visi

Mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu "***Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas***", maka Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

"Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas"

Visi dan Misi Gubernur adalah gambaran umum yang ingin dicapai pemerintah Daerah melalui beberapa sasaran. Untuk melaksanakan rencana strategis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memacu pada beberapa Misi Gubernur yaitu Misi 1 (satu) dan 5 (Lima) yaitu: "***Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera***" dan "***Misi 5 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal.***"

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan yaitu sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera, serta**
- 2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal.**

untuk mewujudkan Misi 1 dan 5 itu maka dalam RPJMD telah ditetapkan indikator Tujuan dan sasaran yang harus dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan yaitu :

- 
- a.Meningkatnya rata-rata lama sekolah;
 - b.Meningkatnya Harapan Lama Sekolah;
 - c.Meningkatnya Skor Literasi/Numerasi; dan
 - d.Meningkatnya indeks Pembangunan kebudayaan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Visi dan Misi Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, maka Tujuan dan sasaran OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja 5 tahun

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Tingkat Intelektualitas dan Pendidikan Masyarakat Serta Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan	Harapan Lama Sekolah	14,15 - 14,18	14,18 - 14,26	14,26 - 14,33	14,33 - 14,41	14,41 - 14,85	14,85 - 15,00
		Rata-rata Lama Sekolah	10,34 - 10,35	10,35 - 10,53	10,53 - 10,70	10,70 - 10,88	10,88 - 11,50	11,50 - 13,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	85	86	86,5	87	87,5	88
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	74	74,50	75	75,5	76	76,5
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,80-58,84	59,36-59,42	59,92-60,00	60,48-60,59	61,04 - 61,17	61,62-61,77
		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	80	81,5	83	84,5	86	88
		Nilai Dimensi Warisan Budaya	47,4	48,8	50,3	51,8	53,4	55
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	74	74,50	75	75,5	76	76,5

2.1.4 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kerja. Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 menetapkan sebagai berikut:

Tabel 4
Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	PAGU TOTAL
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	1,696,134,344,413
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran yang Tersusun	100%	290,319,775
1.01.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	57,335,035
1.01.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	17,906,800
1.01.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	14,778,920
1.01.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	23,130,120
1.01.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	47,270,160

1.01.01.1.01.008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	324 Data	69,242,040
1.01.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	9 Dokumen	60,656,700
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	1,630,857,947,164
1.01.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7551 Orang/Bulan	1,630,023,553,276
1.01.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	831,360,000
1.01.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	0
1.01.01.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,033,888
1.01.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	243 Laporan	0
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengembangkan Kompetensi	90%	40,152,000
1.01.01.1.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	40,152,000
1.01.01.1.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	243 Laporan	0
1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tepat Waktu	100%	27,774,000
1.01.01.1.04.004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	243 Dokumen	0
1.01.01.1.04.007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	27,774,000
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengembangkan Kompetensi	100%	0

1.01.01.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	0
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	387,005,458
1.01.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40,153,800
1.01.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	19,843,658
1.01.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	327,008,000
1.01.01.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	0
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	0
1.01.01.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	0
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	53,957,005,576
1.01.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	0
1.01.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7,386,539,041
1.01.01.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	369,156,535
1.01.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	46,201,310,000
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dilakukan	70%	2,648,200,400
1.01.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	96,480,000

1.01.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	797,606,000
1.01.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	93,878,400
1.01.01.1.09.008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0
1.01.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1,660,236,000
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	7,925,940,040
1.01.01.1.10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	7,925,940,040
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	71.34%	708,340,107,038
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	82.71%	
		Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	82.57%	
		Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	90.18%	
		persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB untuk numerasi	70.95%	
		persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB untuk literasi membaca	80.21%	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA	84.84%	347,057,661,340
		Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	67.03%	
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	74.88%	
		Persentase Ruang Kelas SMA dalam Kondisi Baik	98.82%	
		Persentase SMA/MA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA	64.58	
		Persentase Siswa SMA/ MA Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100%	

		Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	78.50%	
1.01.02.1.01.001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	8,681,233,500
1.01.02.1.01.003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	2,430,993,000
1.01.02.1.01.012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	357,835,000
1.01.02.1.01.014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	6,713,016,540
1.01.02.1.01.015	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	1,752,220,000
1.01.02.1.01.019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	754,883,000
1.01.02.1.01.028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	176,129,000
1.01.02.1.01.036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	328,086,275
1.01.02.1.01.038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	835,997,620
1.01.02.1.01.039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	34,228,000,000
1.01.02.1.01.040	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	0 Unit	0
1.01.02.1.01.041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	543,174,000
1.01.02.1.01.045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta Didik	87,947,010,000
1.01.02.1.01.049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2000 Peserta Didik	178,490,363
1.01.02.1.01.050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	200 Orang	28,926,000,000
1.01.02.1.01.051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450 Orang	69,350,000
1.01.02.1.01.053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	83045 Satuan Pendidikan	151,271,030,000
1.01.02.1.01.060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	132,588,415

1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	10,800,000
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas	121,852,000
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	6,732,000
1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	10 Buku	383,010
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Unit	4,611,667,600
1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	574,353,000
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	16,258,237,017
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	600 Orang	51,000,000
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	230 Satuan Pendidikan	96,600,000
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang bermitra dengan DUDI	95 Satuan Pendidikan	336,755,913,996
		Indeks Inklusivitas SMK	63.26	
		Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	74.98	
		Persentase Siswa SMK Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100%	
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	72.69	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	72.69	
		Persentase Ruang Kelas SMK Dalam Kondisi Baik	97.94%	
		Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100%	
		Persentase peserta didik yang tersertifikasi P1	100%	
		Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	64.64	
1.01.02.1.02.001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	0

1.01.02.1.02.004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	8 Ruang	357,140,000
1.01.02.1.02.010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	2,224,593,365
1.01.02.1.02.011	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	200,000,000
1.01.02.1.02.012	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	0
1.01.02.1.02.028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	30 Paket	2,000,000
1.01.02.1.02.031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	29,963,000,000
1.01.02.1.02.032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	0 Unit	3,000,000
1.01.02.1.02.033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	821,422,000
1.01.02.1.02.037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	90813 Peserta didik	104,316,490,000
1.01.02.1.02.041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta didik	1,648,666,800
1.01.02.1.02.042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	200 Orang	25,560,000,000
1.01.02.1.02.043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650 Orang	53,350,000
1.01.02.1.02.045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	217 Satuan Pendidikan	3,600,000
1.01.02.1.02.046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	83701 Satuan Pendidikan	152,109,770,000
1.01.02.1.02.053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	24,600,000
1.01.02.1.02.054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	3,600,000
1.01.02.1.02.056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	100 Orang	0
1.01.02.1.02.057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	0

1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	0
1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	25000 Orang	0
1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	4400 Buku	0
1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	889,821,453
1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	3 Ruang	209,520,000
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	17,620,392,000
1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	221,426,800
1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	374,225,578
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	218 Satuan Pendidikan	80,496,000
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	68,800,000
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SMALB	79.1	24,526,531,702
		Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	74.46	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	77.83	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	81.54	
		Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100	
		Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	98.58%	
		Persentase Siswa SLB Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100%	
		Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	82.95	
		Indeks Inklusivitas SMALB	74.28	

		Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional.	83.29	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	72.8	
		Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	81.88	
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	76.74	
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	81	
		Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional.	75.05	
		Indeks Inklusivitas SDLB	72.14	
		Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional	76.13	
		Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional.	73.57	
1.01.02.1.03.001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	0
1.01.02.1.03.008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	0
1.01.02.1.03.035	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	640 Paket	0
1.01.02.1.03.038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	610 Paket	813,000,000
1.01.02.1.03.039	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	12 Unit	0
1.01.02.1.03.040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	9 Paket	0
1.01.02.1.03.044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	345 Peserta Didik	4,280,840,000
1.01.02.1.03.048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	983,080,410
1.01.02.1.03.049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	180 Orang	2,754,000,000
1.01.02.1.03.050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	33,000,000
1.01.02.1.03.051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35 Satuan Pendidikan	10,800,000

1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	3458 Satuan Pendidikan	13,564,200,000
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	22 Dokumen	0
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	18,900,000
1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	70 Orang	0
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	0
1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	0
1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	1,596,675,000
1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	95 Ruang	447,886,292
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	35 Satuan Pendidikan	17,100,000
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	3,600,000
1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	0
1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	51 Ruang	0
1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	22 Komunitas	2,400,000
1.01.02.1.03.0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1260 Buku	0
1.01.02.1.03.0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	23 Ruang	1,050,000
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	52%	234,220,000
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah SMA yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	238 Satuan Pendidikan	83,020,000

		Jumlah SMK yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	21 Satuan Pendidikan	
1.01.03.1.01.004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	22 Orang	68,872,000
1.01.03.1.01.007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	14,148,000
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	35 Satuan Pendidikan	151,200,000
1.01.03.1.02.002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	2 Dokumen	10,800,000
1.01.03.1.02.003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	8 Buku	10,800,000
1.01.03.1.02.004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	280 Orang	97,200,000
1.01.03.1.02.005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	4 Buku	10,800,000
1.01.03.1.02.006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	5 Dokumen	10,800,000
1.01.03.1.02.007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	3 Dokumen	10,800,000
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Distribusi Guru	0.6 Indeks	166,600,795
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	52.52%	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100%	166,600,795
		Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang dipenuhi	50%	
1.01.04.1.01.001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	500 Dokumen	87,200,795
1.01.04.1.01.002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	550 Laporan	79,400,000
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	7.5%	0

	BAHASA DAN SASTRA			
1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan lintas daerah yang terlaksana	2 Kegiatan	0
1.01.06.1.01.0012	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	1 Buku	0
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	58%	96,900,000
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	100%	96,900,000
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	0
2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	20 Objek	96,900,000
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah event Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan	0
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	100 Sertifikat	0
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	50%	551,358,000
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina	112 Kesenian	551,358,000
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	200 Orang	0
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	0
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	551,358,000

2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal	30%	0
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal	939 Orang	0
2.22.04.1.01.003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	10 Dokumen	0
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	31%	72,040,000
		Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	50%	
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan terhadap total yang terdaftar	24%	47,040,000
2.22.05.1.01.002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	47,040,000
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	46%	25,000,000
2.22.05.1.02.002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	0
2.22.05.1.02.003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	12 Objek	25,000,000
2.22.05.1.02.004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang	0
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan pengunjung museum	15%	0
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pengunjung Museum	89423 Orang	0
2.22.06.1.01.003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	0

Sumber : RENJA 2026 dan SiPD 2026

2.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan sasaran tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemudian menetapkan indikator kinerja sasaran yang berfungsi memudahkan dalam menilai berhasil atau tidaknya sasaran tersebut serta menilai capaian kinerja instansi pada periode tertentu yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. Indikator kinerja sasaran ini juga menghubungkan antara indikator output atau outcome kegiatan yang ada dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan LKJIP. Dengan kata lain antara indikator kinerja kegiatan dengan indikator sasaran harus terkait dan saling mendukung. Dengan demikian keberhasilan indikator kegiatan juga akan mendukung keberhasilan indikator sasaran yang menginterpretasikan kinerja instansi secara umum.

Adapun indikator kinerja Utama tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2026-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	Persentase	60,14 - 62,64	62,64 - 63,47	63,47 - 64,31	64,31 - 65,14	65,14 - 67,64	67,64 - 68,35	
2	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	Persentase	44,96 - 47,46	47,46 - 47,83	47,83 - 48,19	48,19 - 48,56	48,56 - 51,06	51,06 - 51,26	
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,15 - 14,18	14,18 - 14,26	14,26 - 14,33	14,33 - 14,41	14,41 - 14,85	14,85 - 15,00	
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,34 - 10,35	10,35 - 10,53	10,53 - 10,70	10,70 - 10,88	10,88 - 11,50	11,50 - 13,00	
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	58,80- 58,84	59,36- 59,42	59,92- 60,00	60,48- 60,59	61,04- 61,17	61,62- 61,77	
6	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Indeks	80	81,5	83	84,5	86	88	
7	Nilai Dimensi Warisan Budaya	Nilai	47,4	48,8	50,3	51,8	53,4	55	
8	Indeks Kepuasan	Indeks	85	86	86,5	87	87,5	88	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
	Masyarakat Perangkat Daerah								
9	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	74,50	75	75,5	76	76,5	

Tabel. 7
Indikator Kinerja Utama

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi operasional	Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Tingkat Intelektualitas dan Pendidikan Masyarakat Serta Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan		Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	Persentase Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (literasi membaca/numerasi): Jumlah kabupaten/kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi X. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. Peserta didik yang menjadi subjek perhitungan adalah peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan di bawah Kemendikbudristek dan Kemenag, kecuali sekolah terbuka	(Jumlah Satuan Pendidikan yang mencapai SKM literasi membaca : Total jumlah satuan Pendidikan yang diukur) * 100% (Sumber data Lampiran Mendikdasmen Nomor : 1422/MDM.A/PR.07.05/2025)
		Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional numerasi		(Jumlah Satuan Pendidikan yang mencapai SKM Numerasi: Total jumlah Satuan Pendidikan yang diukur) * 100% (Sumber data Lampiran Mendikdasmen Nomor : 1422/MDM.A/PR.07.05/2025)
		Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah estimasi jumlah tahun yang dapat diharapkan akan dijalani oleh seorang anak untuk mengikuti pendidikan formal, mulai dari usia masuk sekolah (biasanya 7 tahun), jika mengikuti pola partisipasi pendidikan yang berlaku saat ini.	$(HLS = \sum (i * P(i)))$ Dimana: • HLS: adalah Harapan Lama Sekolah. • i: adalah umur individu (dimulai dari usia masuk sekolah, misalnya 7 tahun). • P(i): adalah proporsi penduduk pada umur i yang bersekolah.
		Rata-Rata Lama Sekolah	Ukuran yang menunjukkan berapa tahun rata-rata penduduk suatu wilayah telah menempuh pendidikan formal. RLS biasanya dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena diasumsikan bahwa pada usia tersebut, pendidikan formal seseorang telah selesai. RLS digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat dan kualitas pendidikan dalam suatu wilayah.	Rata-rata Lama Sekolah = (Total Tahun Pendidikan) / (Jumlah Penduduk) Dimana: Total Tahun Pendidikan: Jumlah seluruh tahun pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk dalam Pendidikan formal. Jumlah Penduduk: Jumlah total penduduk pada usia yang dihitung (biasanya 25 tahun ke atas).
		Indeks Pembangunan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah ukuran komposit yang	$IPK = \sum (Bobot Dimensi * Nilai Dimensi)$

		Kebudayaan (IPK)	menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan kebudayaan suatu daerah atau negara, berdasarkan tujuh dimensi utama yang mencerminkan aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	Dimana: IPK: adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan. Bobot Dimensi: adalah nilai bobot yang diberikan untuk setiap dimensi, yang mencerminkan pentingnya dimensi tersebut dalam pembangunan kebudayaan. Nilai Dimensi: adalah nilai yang diperoleh dari perhitungan indikator-indikator dalam setiap dimensi, yang telah dinormalisasi terlebih dahulu.
	Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah ukuran komposit (gabungan beberapa indikator) yang menggambarkan tingkat pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.	(Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar * bobot mutu (20%)) + (Persentase pencapaian penerima layanan dasar * bobot penerima layanan (80%))
	Meningkatnya Kelestarian dan Keberagaman Budaya	Nilai Dimensi Warisan Budaya	Nilai Dimensi Warisan Budaya adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang mencerminkan tingkat keberadaan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengakuan warisan budaya (baik benda maupun takbenda) dalam suatu wilayah, berdasarkan sejumlah dimensi seperti identitas budaya, nilai sejarah, keterlibatan masyarakat, dan kebijakan pelindung budaya.	Nilai Dimensi Warisan Budaya = $\sum \{ (\text{Bobot untuk dimensi ke-i} \times \text{Bobot untuk dimensi ke-I} : \sum (\text{Bobot untuk dimensi ke-i}) \}$

Indikator Kinerja Kunci (1)	Definisi operasional (2)	Perhitungan (3)
Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) adalah proporsi jumlah anak berusia 16 sampai 18 tahun yang sedang mengikuti atau terdaftar dalam program pendidikan menengah (SMA/SMK/MA atau sederajat) pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan total populasi anak usia 16-18 tahun dalam wilayah yang sama.	(Jumlah anak usia 16 -18 tahun yang terdaftar di pendidikan menengah : Total anak usia 16-18 Tahun) *100% (Sumber data Rapor Pendidikan)
Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) adalah proporsi jumlah anak penyandang disabilitas berusia 4 sampai 18 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan khusus (sekolah atau program pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus) dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan total populasi anak penyandang disabilitas pada rentang usia yang sama di wilayah yang sama.	(Jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang terdaftar di pendidikan khusus : Total anak usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas) *100% (Sumber data Rapor Pendidikan)
Kemampuan literasi SMA	kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).	Persentase peserta didik jenjang SMA berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).
Kemampuan numerasi SMA	kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Persentase peserta didik jenjang SMA berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.
Indeks iklim keamanan SMA	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.	Nilai rerata iklim keamanan jenjang SMA terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar.
Indeks iklim kebinekaan SMA	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.	Nilai rerata karakter peserta didik jenjang SMA berdasarkan sikap terhadap kesetaraan agama, budaya, dan gender; nilai minat terhadap budaya dari berbagai negara; dan kepedulian pada isu-isu global.
Indeks iklim inklusivitas SMA	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.	Nilai rerata iklim inklusivitas Jenjang SMA meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar.
Kemampuan literasi SMK	kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).	Persentase peserta didik jenjang SMK berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan,

		merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).
Kemampuan numerasi SMK	kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Persentase peserta didik jenjang SMK berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.
Tingkat penyerapan lulusan SMK	Penyerapan Lulusan SMK adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan persentase lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berhasil terserap ke dunia kerja, melanjutkan pendidikan, atau menjadi wirausaha dalam kurun waktu tertentu (biasanya dalam 6–12 bulan setelah kelulusan), dibandingkan dengan total jumlah lulusan SMK pada periode tersebut.	(Jumlah lulusan yang bekerja, lulusan yang melanjutkan studi (termasuk yang sambil bekerja/berwirausaha), dan lulusan yang berwirausaha : Seluruh lulusan SMK) *100%
Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menunjukkan seberapa puas pihak pengguna lulusan (industri, perusahaan, lembaga kerja) terhadap aspek etika kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja tim, komunikasi, dan sikap profesional lulusan SMK yang telah bekerja di instansi mereka.	(Jumlah lulusan yang mendapatkan penilaian minimal puas dari DUDI memadai : Total lulusan SMK yang bekerja di DUDI) *100%
Indeks iklim keamanan SMK	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.	Nilai rerata iklim keamanan jenjang SMK terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar.
Indeks iklim kebinekaan SMK	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.	Nilai rerata karakter peserta didik jenjang SMK berdasarkan sikap terhadap kesetaraan agama, budaya, dan gender; nilai minat terhadap budaya dari berbagai negara; dan kepedulian pada isu-isu global.
Indeks iklim inklusivitas SMK	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.	Nilai rerata iklim inklusivitas Jenjang SMK meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar.
Kemampuan literasi SDLB	kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).	Persentase peserta didik jenjang SDLB berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).
Kemampuan numerasi SDLB	kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Persentase peserta didik jenjang SDLB berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis

		konteks yang relevan.
Indeks iklim keamanan SDLB	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.	Nilai rerata iklim keamanan jenjang SDLB terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar.
Indeks iklim kebinekaan SDLB	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.	Nilai rerata karakter peserta didik jenjang SDLB berdasarkan sikap terhadap kesetaraan agama, budaya, dan gender; nilai minat terhadap budaya dari berbagai negara; dan kepedulian pada isu-isu global.
Indeks iklim inklusivitas SDLB	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.	Nilai rerata iklim inklusivitas Jenjang SDLB meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar.
Kemampuan literasi SMPLB	kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).	Persentase peserta didik jenjang SMPLB berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).
Kemampuan numerasi SMPLB	kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Persentase peserta didik jenjang SMPLB berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.
Indeks iklim keamanan SMPLB	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.	Nilai rerata iklim keamanan jenjang SMPLB terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar.
Indeks iklim kebinekaan SMPLB	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.	Nilai rerata karakter peserta didik jenjang SMPLB berdasarkan sikap terhadap kesetaraan agama, budaya, dan gender; nilai minat terhadap budaya dari berbagai negara; dan kepedulian pada isu-isu global.
Indeks iklim inklusivitas SMPLB	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.	Nilai rerata iklim inklusivitas Jenjang SMPLB meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar.

Kemampuan literasi SMALB	kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).	Persentase peserta didik jenjang SMALB berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).
Kemampuan numerasi SMALB	kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Persentase peserta didik jenjang SMALB berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.
Indeks iklim keamanan SMALB	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.	Nilai rerata iklim keamanan jenjang SMALB terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar.
Indeks iklim kebinekaan SMALB	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.	Nilai rerata karakter peserta didik jenjang SMALB berdasarkan sikap terhadap kesetaraan agama, budaya, dan gender; nilai minat terhadap budaya dari berbagai negara; dan kepedulian pada isu-isu global.
Indeks iklim inklusivitas SMALB	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.	Nilai rerata iklim inklusivitas Jenjang SMALB meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar.
Jumlah Siswa Penerima Manfaat Gratispol SMA/SMK/SLB /MA (siswa)	Jumlah Siswa Penerima Manfaat Gratispol SMA/SMK/SLB /MA adalah Bantuan Operasional Sekolah Daerah, yaitu dana yang berasal dari pemerintah daerah untuk membiayai operasional sekolah, kegiatan sekolah, dan kebutuhan lain yang belum tercakup oleh dana BOS dari pemerintah pusat. Dana ini digunakan untuk melengkapi kekurangan dana operasional sekolah yang diawasi dan dikelola oleh pemerintah daerah	Total Seluruh Siswa SMA/SMK/SLB /MA Penerima Manfaat Bantuan Operasional Daerah
Jumlah peserta Didik SMA / SMK / SLB/MA yang Mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis (siswa)	Jumlah Siswa Penerima Manfaat Gratispol SMA / SMK / SLB/MA adalah jumlah siswa penerima perlengkapan sekolah dari program prioritas Gubernur	Total Seluruh Siswa SMA / SMK / SLB/MA Penerima Manfaat perlengkapan sekolah dari program prioritas Gubernur
Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	Persentase warisan budaya tak benda (WBTB) yang telah ditetapkan adalah perbandingan antara jumlah WBTB yang telah ditetapkan dengan total pencatatan WBTB, biasanya dihitung per tahun dan mengacu pada data dari kementerian terkait, seperti Kemendikbud. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik upaya pelestarian dan pengakuan WBTB	(Jumlah WBTB yang ditetapkan : Jumlah seluruh WBTB) * 100%
Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jumlah objek, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan telah memperoleh upaya pelestarian sesuai dengan	(Jumlah cagar budaya yang dilestarikan : Total cagar budaya yang terdaftar) * 100%

	ketentuan perundang-undangan dalam periode tertentu.		
Persentase cagar budaya yang ditetapkan	Persentase cagar budaya yang ditetapkan mengacu pada proporsi atau jumlah cagar budaya yang telah secara resmi diakui dan dilindungi oleh pemerintah, dibandingkan dengan total potensi cagar budaya yang ada. Ini adalah ukuran sejauh mana upaya pelestarian cagar budaya telah berhasil dilakukan	(Jumlah cagar budaya yang ditetapkan provinsi : Total cagar budaya yang terdaftar) *100%	
Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi operasional	Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) adalah proporsi jumlah anak berusia 16 sampai 18 tahun yang sedang mengikuti atau terdaftar dalam program pendidikan menengah (SMA/SMK/MA atau sederajat) pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan total populasi anak usia 16-18 tahun dalam wilayah yang sama.	(Jumlah anak usia 16 -18 tahun yang terdaftar di pendidikan menengah : Total anak usia 16-18 Tahun) *100% (Sumber data Rapor Pendidikan)
	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) adalah proporsi jumlah anak penyandang disabilitas berusia 4 sampai 18 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan khusus (sekolah atau program pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus) dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan total populasi anak penyandang disabilitas pada rentang usia yang sama di wilayah yang sama.	(Jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang terdaftar di pendidikan khusus : Total anak usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas) *100% (Sumber data Rapor Pendidikan)

Tabel 8. Pagu Indikatif Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.696.134.344.413,40	APBD-P
2	Program Pengelolaan Pendidikan	708.340.107.037,60	APBD-P
3	Program Pengembangan Kurikulum	234.220.000,00	APBD-P
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	166.600.795,00	APBD-P
5	Program Pengembangan Kebudayaan	96.900.000,00	APBD-P
6	Pengembangan Kesenian Tradisional	551.358.000,00	APBD-P
7	Program Pembinaan Sejarah	0	APBD
8	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	72.040.000,00	APBD-P

9	Program Pengelolaan Permuseuman	0	APBD-P
---	---------------------------------	---	--------

SIRA 2026

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2026

Pada tahun anggaran 2026 Dinas Pendidikan dan kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni dan perubahan sebesar **Rp. 2.405.595.570.246,00**
Adapun realisasi anggaran untuk Triwulan I sebesar **Rp. 294.377.233.843,00 (12,24%)**

2.3 Target Belanja Dinas

Pada tahun anggaran 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9
Target Belanja Dinas

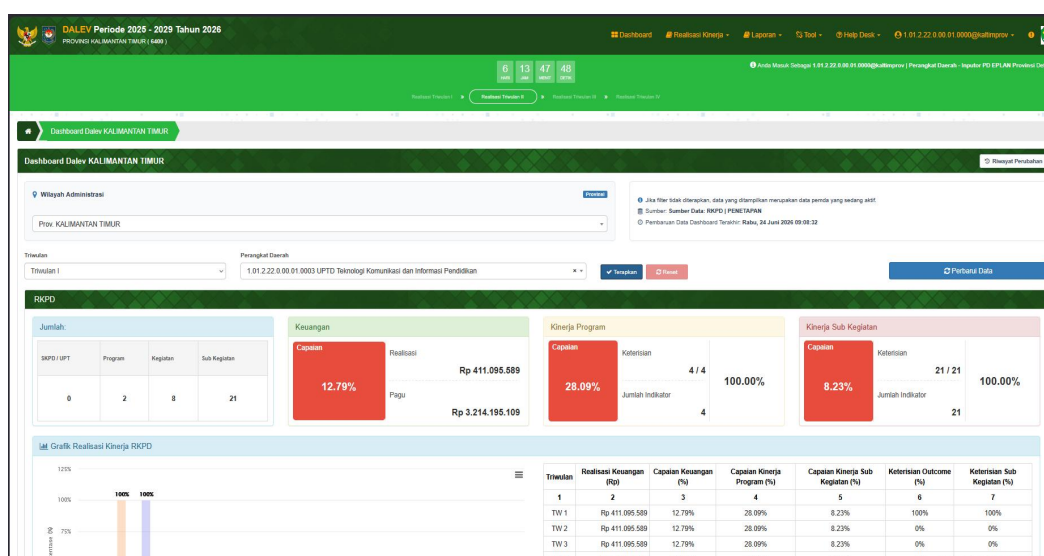
No.	Uraian	Tahun Anggaran 2026		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja TW I	%
1	Belanja Operasional	2.265.020.601.882,40	294.377.233.843,00	12.24%

2.3 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam Rangka pencapaian kinerja dari tahap perencanaan hingga evaluasi Dinas 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi internal dari Kalimantan timur. Beberapa aplikasi ini juga digunakan sebagai acuan pengambilan Keputusan terkait evaluasi pertriwulanya diantara lain :

a. SiPD Dalev

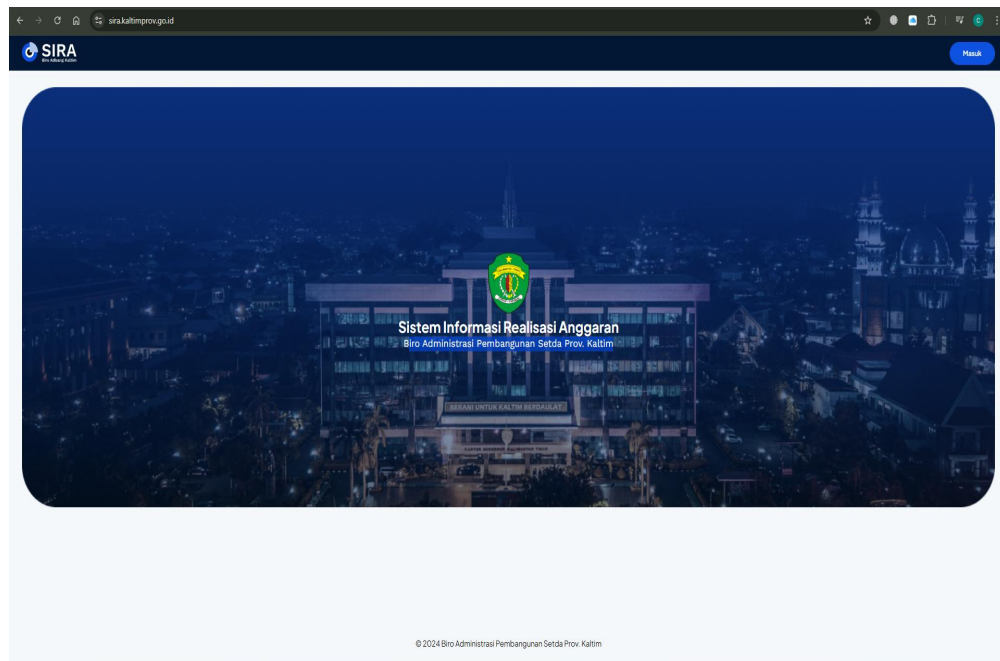
Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan dalam menghimpun laporan progres realisasi pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPD/Renja. Aplikasi ini juga menjadi instrumen monitoring evaluasi pertriwulan oleh Bappeda terhadap Pemerintah Daerah terkait setiap triwulannya.



Gambar.2 Tampilan Layar Aplikasi SiPD Dalev

b. SIRA (Sistem Informasi Anggaran)

Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan dalam menghimpun laporan progres realisasi pekerjaan fisik dan keuangan sesuai dengan kode rekening belanja masing-masing secara mendetail. Aplikasi ini juga menjadi instrument terkait monitoring evaluasi pertriwulan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim Pemerintah Daerah terkait setiap triwulannya.



Gambar.3 Tampilan Layar Aplikasi SIRA

c. E-Sakip (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)

Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan dalam menghimpun laporan progres realisasi program kegiatan dan subkegiatan hingga ke rencana aksi masing-masing individu. Aplikasi ini membantu dalam memonitoring dan evaluasi kegiatan atau aktivitas setiap individu dari rencana aksi hingga realiasi kinerja dan realisasi anggaranya dan menjadi bahan evaluasi dari Biro Organisasi Setda Prov. Pemerintah Daerah terkait setiap triwulannya.



Gambar.4 Tampilan Layar Aplikasi E-SAKIP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Berdasarkan penetapan tersebut, analisis capaian kinerja pada Triwulan I ini difokuskan pada pemantauan kemajuan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana aksi tahunan. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah direncanakan dengan realisasi keterisian pada Triwulan I dan Realisasi anggaran yang tercatat pada Sistem Informasi Realisasi Anggaran (SIRA). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memandang bahwa pengukuran yang objektif terhadap IKU merupakan fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pada triwulan berikutnya.

Evaluasi terhadap capaian ini tidak hanya melihat angka persentase keberhasilan semata, namun juga menggali faktor-faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Melalui integrasi data dari aplikasi SiPD Dalev, SIRA, dan E-Sakip, analisis ini memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana setiap bidang dan unit kerja telah berkontribusi terhadap sasaran strategis daerah.

Selain itu, analisis ini juga mencakup penilaian terhadap kualitas layanan publik dan transparansi tata kelola birokrasi. Dengan mengacu pada skala nilai peringkat kinerja SAKIP, setiap indikator kinerja dievaluasi kategorinya guna memastikan bahwa tidak ada program yang masuk dalam kategori "Sangat Kurang" tanpa adanya rencana tindak lanjut yang konkret. Detail mengenai capaian per indikator kinerja sasaran strategis beserta perbandingan realisasi terhadap target pada Triwulan I disajikan secara mendalam pada tabel berikut ini:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, analisis terhadap capaian masing-masing indikator dilakukan untuk mengidentifikasi gap antara target yang ditetapkan dengan realisasi di lapangan. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap faktor pendukung keberhasilan serta kendala yang menghambat pelaksanaan program, baik dari aspek manajerial, ketersediaan sumber daya manusia, maupun koordinasi antar unit kerja. Penggunaan aplikasi SiPD Dalev, SIRA, dan E-SAKIP memberikan data yang akurat bagi manajemen untuk melakukan koreksi kebijakan secara cepat dan tepat sasaran.

Berikut adalah rincian capaian indikator kinerja utama yang telah dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada periode laporan ini. Data ini mencerminkan progres awal tahun yang menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya, guna memastikan seluruh target sasaran strategis, mulai dari peningkatan Harapan Lama Sekolah hingga optimalisasi layanan publik, dapat tercapai sesuai dengan standar peringkat kinerja yang diharapkan.

3.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Triwulan I

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

Tabel10. Perbandingan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan Triwulan I TA 2025 dengan TA 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET TERISIAN TW I	
				2025	2026
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	32 Indeks	27.19 Indeks
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	70.27%	100%
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran yang Tersusun	100%	54%	0%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	26.64%	0%
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengembangkan Kompetensi	90%	18.75%	0%
1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tepat Waktu	100%	56%	0%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET TERISIAN TW I	
				2025	2026
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengembangkan Kompetensi	100%	10.14%	0%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	47.72%	0%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	68.13%	0%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	100%	37.99%	0%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dilakukan	70%	0%	0%
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	0%	0%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	71.34%	0%	0%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	82.71%	0%	0%
		Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	82.57%	0%	0%
		Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	90.18%	0%	0%
		persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB untuk numerasi	70.95%	0%	0%
		persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB untuk literasi membaca	80.21%	0%	0%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA	84.84%	0.00%	0.00%
		Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	67.03%	0.00%	0.00%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET TERISIAN TW I	
				2025	2026
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	74.88%	0.00%	0.00%
		Persentase Ruang Kelas SMA dalam Kondisi Baik	98.82%	0.00%	0.00%
		Persentase SMA/MA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100%	0.00%	0.00%
		Indeks Inklusivitas SMA	64.58	0.00%	0.00%
		Persentase Siswa SMA/MA Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100%	0.00%	0.00%
		Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	78.50%	0.00%	0.00%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang bermitra dengan DUDI	95 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan
		Indeks Inklusivitas SMK	63.26	0	0
		Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	74.98	0	0
		Persentase Siswa SMK Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100%	0	0
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	72.69	0	0
		Indeks Iklim Keamanan SMK	72.69	0	0
		Persentase Ruang Kelas SMK Dalam Kondisi Baik	97.94%	0%	0%
		Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100%	0%	0%
		Persentase peserta didik yang tersertifikasi P1	100%	0%	0%
		Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	64.64	0	0
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SMALB	79.1	0	0
		Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	74.46	0	0
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	77.83	0	0
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	81.54	0	0

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET TERISIAN TW I	
				2025	2026
		Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100	0	0
		Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	98.58%	0%	0%
		Persentase Siswa SLB Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100%	0%	0%
		Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	82.95	0	0
		Indeks Inklusivitas SMALB	74.28	0	0
		Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional.	83.29	0	0
		Indeks Inklusivitas SMPLB	72.8	0	0
		Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	81.88	0	0
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	76.74	0	0
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	81	0	0
		Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional.	75.05	0	0
		Indeks Inklusivitas SDLB	72.14	0	0
		Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional	76.13	0	0
		Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional.	73.57	0	0
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	52%	0%	0%
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah SMA yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	238 Satuan Pendidikan	0	0
		Jumlah SMK yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	21 Satuan Pendidikan	0	0

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET TERISIAN TW I	
				2025	2026
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	35 Satuan Pendidikan	0	0
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Distribusi Guru	0.6 Indeks	0	0
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	52.52%	0	0
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100%	0%	0%
		Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang dipenuhi	50%	0%	0%
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	7.5%	0.0%	0.0%
1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan lintas daerah yang terlaksana	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	58%	0%	0%
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	100%	0%	0%
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah event Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	50%	0%	0%
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina	112 Kesenian	0	0

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET TERISIAN TW I	
				2025	2026
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal	30%	0%	0%
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal	939 Orang	0	0
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	31%	0%	0%
		Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	50%	0%	0%
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan terhadap total yang terdaftar	24%	0%	0%
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	46%	0%	0%
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan pengunjung museum	15%	0%	0%
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pengunjung Museum	89423 Orang	0 Orang	0 Orang

Sumber : Evdoren 2025 dan SiPD Dalev 2026

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian pada sasaran realisasi kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi mengalami penurunan keterisian realisasi Triwulan I pada Tahun sebelumnya dengan nilai Indeks 32 dan realisasi triwulan I di tahun ini senilai 27.19 yang mana terjadi penurunan sebesar 8% dari tahun sebelumnya. Realisasi pencapaian pada Kegiatan pendidikan pada Triwulan I, 95% nya masih bernilai 0% (nol) karena realisasi relatif belum terlaksana pada triwulan I.

indikator kinerja pada Triwulan I menunjukkan tren yang bervariasi di berbagai program prioritas. Berdasarkan data yang tersaji, terdapat beberapa poin krusial yang memerlukan analisis mendalam terkait faktor pendukung keberhasilan maupun kendala yang dihadapi di lapangan.

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada

Triwulan I Tahun 2026. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (SIRA), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki alokasi anggaran sebesar Rp2.265.020.601.882,00, dengan realisasi hingga akhir Triwulan I sebesar Rp294.377.233.843,00 atau 12,24% dari total pagu anggaran.

Realisasi anggaran tersebut masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan pagu yang tersedia. Namun demikian, kondisi ini perlu dipahami dalam konteks karakteristik pelaksanaan program pada awal tahun anggaran. Sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan, seperti penyusunan rencana operasional, penyelesaian dokumen administrasi, pengadaan barang dan jasa, koordinasi lintas bidang, serta penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penyerapan anggaran pada Triwulan I belum mencerminkan keseluruhan tingkat pelaksanaan program dan akan meningkat seiring dimulainya pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Komposisi penyerapan anggaran, realisasi terbesar berasal dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan capaian sebesar 17,27%. Penyerapan tersebut didominasi oleh belanja pegawai, administrasi keuangan, serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang merupakan belanja rutin dan wajib. Tingginya realisasi pada program penunjang menunjukkan bahwa sumber daya telah dimanfaatkan secara efektif untuk menjaga keberlangsungan operasional organisasi dan mendukung pelayanan administrasi pemerintahan sehingga aktivitas perangkat daerah tetap berjalan dengan baik.

Sementara itu, Program Pengelolaan Pendidikan sebagai program teknis dengan alokasi anggaran terbesar kedua baru mencatatkan realisasi sekitar 0,21%. Kondisi yang sama juga terjadi pada Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, serta Program Pengelolaan Permuseuman. Pada Triwulan I belum menunjukkan penyerapan anggaran yang signifikan. Hal tersebut disebabkan sebagian besar kegiatan teknis belum memasuki tahap implementasi, melainkan masih berada pada proses perencanaan, persiapan teknis, dan penyelesaian administrasi pelaksanaan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, sebagian besar indikator program juga masih menunjukkan realisasi 0%. Kondisi ini tidak sepenuhnya menggambarkan rendahnya efektivitas pelaksanaan program, mengingat banyak indikator yang bersifat outcome dan baru dapat diukur setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Indikator seperti angka partisipasi sekolah, hasil Asesmen Nasional, tingkat penyerapan lulusan SMK, pengembangan kurikulum muatan lokal, pelestarian kebudayaan, hingga peningkatan jumlah pengunjung museum merupakan indikator yang pencapaiannya bergantung pada pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun anggaran.

Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan I lebih diarahkan pada pemanfaatan anggaran untuk mendukung kesiapan pelaksanaan program melalui pembiayaan operasional, administrasi, dan proses persiapan kegiatan. Meskipun tingkat penyerapan anggaran masih rendah, alokasi sumber daya telah dimanfaatkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan program dan prioritas kebutuhan organisasi pada awal tahun anggaran.

Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan melalui percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa, penguatan koordinasi antarbidang, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan anggaran secara proporsional dengan pencapaian output dan outcome program, sehingga target kinerja dan target keuangan dapat tercapai secara optimal hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

Tabel 11. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TA 2026

No	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian TW I	Analisis Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.696.134.344.413	292.879.424.713	17,27%	Penyerapan relatif baik karena didominasi belanja rutin, belanja pegawai, dan operasional perangkat daerah.
2	Program Pengelolaan Pendidikan	708.340.107.038	±1,50 miliar	0,21%	Penyerapan masih sangat rendah karena sebagian besar kegiatan teknis belum memasuki tahap

					pelaksanaan.
3	Program Pengembangan Kurikulum	234.220.000	0	0%	Kegiatan masih pada tahap persiapan dan penyusunan pelaksanaan.
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	166.600.795	0	0%	Belum terdapat realisasi karena pelaksanaan kegiatan belum dimulai.
5	Program Pengembangan Kebudayaan	96.900.000	0	0%	Kegiatan masih dalam tahap perencanaan dan penjadwalan.
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	551.358.000	0	0%	Belum terdapat pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I.
7	Program Pembinaan Sejarah	0	0	0%	Tidak terdapat alokasi anggaran pada Triwulan I.
8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	72.040.000	0	0%	Kegiatan belum memasuki tahap pelaksanaan.
9	Program Pengelolaan Permuseuman	0	0	0%	Tidak terdapat alokasi anggaran pada Triwulan I.

Sumber data : SIRA 2026

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan I masih didominasi oleh belanja rutin yang mendukung operasional perangkat daerah. Penyerapan anggaran program teknis masih rendah karena mayoritas kegiatan belum memasuki tahap implementasi. Dengan demikian, fokus pada triwulan berikutnya adalah percepatan pelaksanaan kegiatan agar realisasi anggaran sejalan dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Triwulan 1 2026

Tabel 12. Perbandingan Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kegiatan Triwulan I TA 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI TW I 2026
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	27.19 Indeks

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI TW I 2026
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran yang Tersusun	100%	0%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	0%
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengembangkan Kompetensi	90%	0%
1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tepat Waktu	100%	0%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengembangkan Kompetensi	100%	0%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	0%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	0%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	100%	0%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dilakukan	70%	0%
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	0%

Sumber : SiPD Dalev 2026

Berdasarkan data realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026, capaian pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi menunjukkan hasil yang bervariasi. Indikator Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan memiliki target tahunan sebesar 92 indeks, dengan realisasi Triwulan I sebesar 27,19 indeks atau sekitar 29,55% dari target tahunan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target mulai terealisasi sesuai tahapan pelaksanaan pada awal tahun anggaran.

Sementara itu, indikator Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti telah mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga tingkat pencapaiannya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh keluhan pengguna layanan yang diterima pada Triwulan I telah ditindaklanjuti dengan baik.

Adapun pada tingkat kegiatan, seluruh indikator masih menunjukkan realisasi 0% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut meliputi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Pengadaan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah, serta Peningkatan Pelayanan BLUD.

Belum adanya realisasi pada seluruh kegiatan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan output kegiatan masih berada pada tahap persiapan, proses administrasi, atau pelaksanaan awal sehingga capaian fisik maupun kinerja belum dapat diinput pada Triwulan I. Dengan demikian, meskipun sebagian indikator program telah menunjukkan capaian yang baik, khususnya pada penyelesaian tindak lanjut keluhan layanan, percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan agar target kinerja tahunan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel. Perbandingan Target Program Pengelolaan Pendidikan dan Kegiatan Triwulan I TA 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI TW I 2026
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	71.34%	0%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	82.71%	0%
		Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	82.57%	0%
		Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	90.18%	0%

		persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB untuk numerasi	70.95%	0%
		persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB untuk literasi membaca	80.21%	0%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA	84.84%	0.00%
		Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	67.03%	0.00%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	74.88%	0.00%
		Persentase Ruang Kelas SMA dalam Kondisi Baik	98.82%	0.00%
		Persentase SMA/MA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100%	0.00%
		Indeks Inklusivitas SMA	64.58	0.00%
		Persentase Siswa SMA/MA Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100%	0.00%
		Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	78.50%	0.00%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang bermitra dengan DUDI	95 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan
		Indeks Inklusivitas SMK	63.26	0
		Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	74.98	0
		Persentase Siswa SMK Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100%	0
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	72.69	0
		Indeks Iklim Keamanan SMK	72.69	0
		Persentase Ruang Kelas SMK Dalam Kondisi Baik	97.94%	0%
		Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100%	0%

		Persentase peserta didik yang tersertifikasi P1	100%	0%
		Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	64.64	0
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SMALB	79.1	0
		Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	74.46	0
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	77.83	0
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	81.54	0
		Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100	0
		Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	98.58%	0%
		Persentase Siswa SLB Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100%	0%
		Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	82.95	0
		Indeks Inklusivitas SMALB	74.28	0
		Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional.	83.29	0
		Indeks Inklusivitas SMPLB	72.8	0
		Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	81.88	0
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	76.74	0
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	81	0
		Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional.	75.05	0
		Indeks Inklusivitas SDLB	72.14	0
		Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional	76.13	0
		Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional.	73.57	0

Sumber : SiPD Dalev 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026, Program Pengelolaan Pendidikan memiliki 6 indikator program dan 3 kegiatan dengan target kinerja yang beragam, meliputi peningkatan angka partisipasi pendidikan, penyerapan lulusan SMK, kepuasan dunia kerja, serta peningkatan mutu pendidikan melalui indikator literasi dan numerasi.

Pada tingkat program, seluruh indikator masih menunjukkan realisasi 0% dibandingkan dengan target tahunan yang telah ditetapkan. Indikator tersebut meliputi Persentase Anak Usia 4–18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (target 71,34%), Tingkat Penyerapan Lulusan SMK (82,71%), Persentase Anak Usia 16–18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (82,57%), Tingkat Kepuasan Dunia Kerja terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK (90,18%), Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Jenjang SMA/SMK/SLB untuk Numerasi (70,95%), serta Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Jenjang SMA/SMK/SLB untuk Literasi Membaca (80,21%).

Pada tingkat kegiatan, yaitu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pengelolaan Pendidikan Khusus, seluruh indikator juga masih menunjukkan realisasi 0% terhadap target yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut mencakup aspek kualitas layanan pendidikan, iklim keamanan dan kebhinekaan sekolah, inklusivitas, kompetensi literasi dan numerasi, kondisi sarana prasarana, kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pemberian bantuan operasional dan bantuan perlengkapan bagi peserta didik.

Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa hingga akhir Triwulan I belum terdapat capaian kinerja yang dapat diukur pada seluruh indikator program maupun kegiatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaksanaan program masih berada pada tahap persiapan, pelaksanaan awal kegiatan, atau menunggu hasil pengukuran yang dilakukan secara periodik pada semester maupun akhir tahun, seperti hasil Asesmen Nasional, angka partisipasi sekolah, penyerapan lulusan, dan survei kepuasan dunia kerja. Oleh karena itu, belum adanya realisasi pada Triwulan I masih sejalan dengan karakteristik

indikator yang pencapaiannya baru dapat dihitung setelah seluruh rangkaian kegiatan pendidikan dilaksanakan pada triwulan-triwulan berikutnya.

Tabel 13. Perbandingan Target Program Pengembangan Kurikulum Dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI TW I 2026
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	52%	0%
1.01.03. 1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah SMA yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	238 Satuan Pendidikan	0
		Jumlah SMK yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	21 Satuan Pendidikan	0
1.01.03. 1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	35 Satuan Pendidikan	0

Sumber : SiPD Dalev 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026, Program Pengembangan Kurikulum memiliki 1 indikator program dan 2 kegiatan yang berfokus pada pengembangan kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Pada tingkat program, indikator Persentase Sekolah yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal memiliki target tahunan sebesar 52%, namun hingga akhir Triwulan I masih menunjukkan realisasi 0%. Hal ini menunjukkan bahwa belum terdapat satuan pendidikan yang tercatat telah menyelesaikan proses pengembangan kurikulum muatan lokal pada periode pelaporan Triwulan I.

Pada tingkat kegiatan, baik Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah maupun Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus juga masih menunjukkan realisasi 0 terhadap target yang telah ditetapkan. Kegiatan Penetapan

Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah memiliki target 238 SMA dan 21 SMK yang mengembangkan kurikulum muatan lokal, sedangkan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus memiliki target 35 satuan pendidikan khusus. Seluruh target tersebut belum menunjukkan capaian pada Triwulan I.

Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa hingga akhir Triwulan I belum terdapat capaian pada seluruh indikator program maupun kegiatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses penyusunan, penetapan, serta implementasi kurikulum muatan lokal masih berada pada tahap persiapan dan koordinasi dengan satuan pendidikan, sehingga hasil pelaksanaannya belum dapat direalisasikan pada awal tahun anggaran. Diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat dipercepat pada triwulan berikutnya agar target pengembangan kurikulum muatan lokal dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 14. Perbandingan Target Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI TW I 2026
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Distribusi Guru	0.6 Indeks	0
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	52.52%	0
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100%	0%
		Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang dipenuhi	50%	0%

Sumber : SiPD Dalev 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki 2 indikator program dan 1 kegiatan yang berfokus pada pemerataan distribusi pendidik dan peningkatan kualitas tenaga kependidikan di Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tingkat program, indikator Indeks Distribusi Guru memiliki target tahunan sebesar 0,6 indeks, sedangkan indikator Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik memiliki target 52,52%. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, kedua indikator

tersebut masih menunjukkan realisasi 0, sehingga belum terdapat capaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Pada tingkat kegiatan, yaitu Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi, terdapat dua indikator kinerja, yaitu Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana dengan target 100%, serta Persentase Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Dipenuhi dengan target 50%. Kedua indikator tersebut juga masih menunjukkan realisasi 0% pada Triwulan I.

Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa hingga akhir Triwulan I belum terdapat capaian pada seluruh indikator program maupun kegiatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan distribusi guru, pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pemutakhiran data sertifikasi dan kualifikasi pendidik masih berada pada tahap persiapan dan proses administrasi. Selain itu, beberapa indikator memerlukan hasil pelaksanaan kebijakan dan pemutakhiran data yang umumnya baru dapat diukur pada triwulan berikutnya atau pada akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan capaian pada triwulan selanjutnya diperlukan agar target kinerja tahunan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan.

Tabel 15. Perbandingan Target Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Serta Kegiatan Triwulan I TA 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI TW I 2026
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	7.5%	0.0%
1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan lintas daerah yang terlaksana	2 Kegiatan	0 Kegiatan

Sumber : SiPD Dalev 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026, Program Pengembangan Bahasa dan Sastra memiliki 1 indikator program dan 1 kegiatan. Indikator program Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra memiliki target sebesar 7,5%, namun hingga akhir Triwulan I masih menunjukkan realisasi 0%.

Pada tingkat kegiatan, Pembinaan, Pengembangan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi memiliki target 2 kegiatan, dengan realisasi 0 kegiatan pada Triwulan I. Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa seluruh indikator program dan kegiatan belum mencapai target pada Triwulan I. Kondisi ini disebabkan pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahap persiapan sehingga realisasi kinerja diperkirakan akan mulai tercapai pada triwulan berikutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan.

Tabel 16. Perbandingan Target Program Pengembangan Kebudayaan serta Kegiatan Triwulan I TA 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI TW I 2026
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	58%	0%
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	100%	0%
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah event Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan	0 Kegiatan

Sumber : SiPD Dalev 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026, Program Pengembangan Kebudayaan memiliki 1 indikator program dan 2 kegiatan. Indikator program Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Telah Ditetapkan terhadap Total Pencatatan memiliki target sebesar 58%, namun hingga akhir Triwulan I masih

menunjukkan realisasi 0%.

Pada tingkat kegiatan, Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi memiliki target 100% untuk indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan, sedangkan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi memiliki target 1 kegiatan. Kedua kegiatan tersebut masih menunjukkan realisasi 0% pada Triwulan I.

Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa seluruh indikator program dan kegiatan belum mencapai target pada Triwulan I. Kondisi ini disebabkan pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahap persiapan dan penjadwalan, sehingga realisasi kinerja diharapkan mulai tercapai pada triwulan berikutnya sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

Tabel 17. Perbandingan Target Program Pengembangan Kesenian Tradisional serta Kegiatan Triwulan I Ta 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI TW I 2026
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	50%	0%
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina	112 Kesenian	0

Sumber : SiPD Dalev 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026, Program Pengembangan Kesenian Tradisional memiliki 1 indikator program dan 1 kegiatan. Indikator program Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Menonton Secara Langsung Pertunjukan Seni memiliki target sebesar 50%, namun hingga akhir Triwulan I masih menunjukkan realisasi 0%.

Pada tingkat kegiatan, Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota memiliki target 112 kesenian yang dibina, dengan realisasi 0 pada Triwulan I.

Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa seluruh indikator program dan kegiatan belum mencapai target pada Triwulan I karena pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahap persiapan. Realisasi kinerja diharapkan mulai meningkat pada triwulan berikutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Tabel 18. Perbandingan Target Program Pembinaan Sejarah serta Kegiatan Triwulan I Ta 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI TW I 2026
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal	30%	0%
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal	939 Orang	0

Sumber : SiPD Dalev 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026, Program Pembinaan Sejarah memiliki 1 indikator program dan 1 kegiatan. Indikator program Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal memiliki target sebesar 30%, namun hingga akhir Triwulan I masih menunjukkan realisasi 0%.

Pada tingkat kegiatan, Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi memiliki target 939 orang yang mengakses informasi sejarah lokal, dengan realisasi 0 orang pada Triwulan I.

Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa seluruh indikator program dan kegiatan belum mencapai target pada Triwulan I karena pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahap persiapan. Realisasi kinerja diharapkan mulai meningkat pada triwulan berikutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Tabel 19. Perbandingan Target Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Kegiatan
Triwulan I Ta 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI TW I 2026
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persenatse Cagar Budya yang ditetapkan	31%	0%
		Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	50%	0%
2.22.05 .1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan terhadap total yang terdaftar	24%	0%
2.22.05 .1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	46%	0%

Sumber : SiPD Dalev 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya memiliki 2 indikator program dan 2 kegiatan. Indikator program Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan memiliki target sebesar 31%, sedangkan Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan memiliki target 50%. Hingga akhir Triwulan I, kedua indikator tersebut masih menunjukkan realisasi 0%.

Pada tingkat kegiatan, Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi memiliki target 24% cagar budaya yang ditetapkan terhadap total yang terdaftar, sedangkan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi memiliki target 46% cagar budaya yang dimanfaatkan. Kedua kegiatan tersebut juga masih menunjukkan realisasi 0% pada Triwulan I.

Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa seluruh indikator program dan kegiatan belum mencapai target pada Triwulan I karena pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahap persiapan. Realisasi kinerja diharapkan mulai meningkat pada triwulan berikutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Tabel 20. Perbandingan Target Program Pengelolaan Permuseuman serta Kegiatan Triwulan I
TA 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI TW I 2026
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan pengunjung museum	15%	0%
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pengunjung Museum	89423 Orang	0 Orang

Sumber : SiPD Dalev 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026, Program Pengelolaan Permuseuman memiliki 1 indikator program dan 1 kegiatan. Indikator program Persentase Peningkatan Pengunjung Museum memiliki target sebesar 15%, namun hingga akhir Triwulan I masih menunjukkan realisasi 0%.

Pada tingkat kegiatan, Pengelolaan Museum Provinsi memiliki target 89.423 orang pengunjung museum, dengan realisasi 0 orang pada Triwulan I.

Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa seluruh indikator program dan kegiatan belum mencapai target pada Triwulan I karena pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahap persiapan. Realisasi kinerja diharapkan mulai meningkat pada triwulan berikutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026, secara umum perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator program, kegiatan, dan subkegiatan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Mayoritas indikator masih mencatatkan realisasi 0%, sementara hanya beberapa indikator yang telah menunjukkan capaian awal sesuai karakteristik pengukurannya.

Kondisi tersebut disebabkan karena pada Triwulan I sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan, perencanaan, pengadaan, proses administrasi, koordinasi, maupun pelaksanaan awal, sehingga output dan outcome yang menjadi dasar pengukuran kinerja belum dapat direalisasikan. Selain itu, beberapa indikator, khususnya pada bidang pendidikan dan kebudayaan, merupakan indikator yang pengukurannya dilakukan secara

periodik atau berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun, sehingga capaian baru dapat diperoleh pada triwulan berikutnya atau pada akhir tahun anggaran.

Dengan demikian, belum optimalnya realisasi kinerja pada Triwulan I tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya pelaksanaan program, melainkan lebih dipengaruhi oleh karakteristik waktu pelaksanaan dan mekanisme pengukuran masing-masing indikator. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala pada Triwulan II hingga Triwulan IV agar target kinerja tahunan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

1. Capaian Kinerja Lainnya, Faktor Ketercapaian Target, Faktor Penghambat Target pada Triwulan I

a. Faktor Ketercapaian Target pada Triwulan I

Secara umum, capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 masih didominasi oleh pelaksanaan kegiatan yang bersifat administratif, perencanaan, dan operasional rutin. Meskipun sebagian besar indikator program belum menunjukkan capaian yang signifikan, terdapat beberapa faktor yang mendukung terlaksananya target pada tahap awal pelaksanaan, antara lain:

1. Pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan berjalan dengan baik, ditunjukkan oleh tercapainya indikator Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat telah berjalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
2. Belanja operasional perangkat daerah telah terealisasi sejak awal tahun anggaran, terutama pada belanja pegawai, administrasi keuangan, serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan. Kondisi ini mendukung keberlangsungan operasional perangkat daerah sehingga pelayanan publik tetap berjalan secara optimal.

3. Tahapan perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan, meliputi penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan jadwal kegiatan, koordinasi dengan bidang teknis, serta persiapan administrasi lainnya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.
4. Koordinasi internal antarbidang dan unit pelaksana berjalan dengan baik, sehingga proses perencanaan dan penyiapan kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

b. Faktor Penghambat pada Triwulan I

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sebagian besar target belum dapat dicapai pada Triwulan I, yaitu:

1. Sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan, seperti proses perencanaan teknis, penyusunan dokumen pendukung, koordinasi lintas sektor, serta persiapan pelaksanaan kegiatan sehingga output kegiatan belum dapat direalisasikan.
2. Karakteristik indikator kinerja yang bersifat outcome, khususnya pada bidang pendidikan dan kebudayaan, menyebabkan capaian indikator baru dapat diukur setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Indikator seperti Angka Partisipasi Sekolah, hasil Asesmen Nasional, penyerapan lulusan SMK, pengembangan kurikulum, pelestarian budaya, dan kunjungan museum umumnya baru dapat diukur pada semester akhir atau akhir tahun.
3. Pelaksanaan kegiatan masih mengikuti kalender pendidikan dan jadwal kegiatan sektoral, sehingga beberapa kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah proses pembelajaran, asesmen, maupun agenda kebudayaan memasuki jadwal pelaksanaannya.
4. Proses pengadaan barang dan jasa serta administrasi pelaksanaan kegiatan masih berlangsung pada Triwulan I sehingga berdampak terhadap rendahnya realisasi fisik

maupun penyerapan anggaran pada program-program teknis.

5. Realisasi anggaran masih terkonsentrasi pada belanja rutin, sedangkan belanja program pembangunan dan kegiatan teknis sebagian besar baru akan dilaksanakan pada Triwulan II hingga Triwulan IV sesuai dengan rencana penarikan dana.

c. Upaya Realisasi dan Perencanaan pada Triwulan Berikutnya

Untuk meningkatkan capaian kinerja dan penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Mempercepat pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga target output dapat mulai direalisasikan sejak Triwulan II.
2. Mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi kontrak, serta percepatan pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penumpukan realisasi pada akhir tahun anggaran.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian fisik, keuangan, dan indikator kinerja pada setiap program, kegiatan, dan subkegiatan untuk mengidentifikasi kendala serta menyusun langkah percepatan penyelesaiannya.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh bidang, cabang dinas, satuan pendidikan, serta instansi terkait guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target waktu dan sasaran yang telah ditetapkan.
5. Mengoptimalkan penginputan dan pelaporan realisasi kinerja melalui aplikasi SIPD e-Dalev secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan bukti dukung pelaksanaan kegiatan agar capaian kinerja dapat terdokumentasi secara optimal.

6. Melakukan evaluasi berkala terhadap penyerapan anggaran dan pencapaian indikator kinerja sehingga apabila terdapat deviasi terhadap target, dapat segera dilakukan langkah perbaikan, penyesuaian strategi pelaksanaan, maupun percepatan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan realisasi kinerja maupun penyerapan anggaran dapat meningkat secara signifikan pada Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV sehingga target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran APBD murni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebesar Rp. 3.747.312.069.958,00 sedangkan anggaran APBN (Dana Dekonsentrasi) Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 0,-. Secara rinci alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari berbagai sumber dari APBN dan APBD. Pada Tahun 2026 Anggaran Pendidikan baik alokasi maupun realisasi adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

1. Realisasi Anggaran Perprogram dan Kegiatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 terdiri dari 9 Program pendidikan dan 24 Kegiatan pengelolaan pendidikan. Total realisasi anggaran yang tercapai dalam kurun Triwulan I sebesar 12.24% dengan total pagu **Rp. 2.405.595.570.246,00** dan yang telah terealisasi **Rp. 294.377.233.843,00**. Adapun capaian realisasi kegiatan sebagai berikut :

No	Kode	Kegiatan	Pagu Total	Pagu Realisasi Triwulan I	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			2,265,020,601,882	294,377,233,843	12.24 %
1	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	290,319,775	0	0%
2	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,630,857,947,164	283,444,707,552	17%

3	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40,152,000	4,336,023	11%
4	1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	27,774,000	0	0%
5	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0%
6	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	387,005,458	0	0%
7	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0%
8	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53,957,005,576	9,430,381,138	17%
9	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,648,200,400	0	0%
10	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	7,925,940,040	0	0%
11	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	347,057,661,340	585,291,762	0%
12	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	336,755,913,996	829,717,368	0%
13	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	24,526,531,702	82,800,000	0%
14	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	83,020,000	0	0%
15	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	151,200,000	0	0%
16	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	166,600,795	0	0%
17	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	0	0%
18	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	96,900,000	0	0%

19	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	0	0	0%
20	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	551,358,000	0	0%
21	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	0	0	0%
22	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	47,040,000	0	0%
23	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	25,000,000	0	0%
24	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	0	0	0%

Sumber data : SIRA 2026

Tabel 16. Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Program Triwulan I
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahun Lalu (%)
A	DISDIKBUD	2,265,020,601,882,00	294,377,233,843,00	12.24%	91,02%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.696.134.344.413,40	292.879.424.713,00	17.27%	17,27%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	708.340.107.037,60	0	0.21%	0%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	234.220.000,00	0	0%	0%
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	166.600.795,00	0	0%	0%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	96.900.000,00	0	0%	2.33%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	551.358.000,00	0	0%	0.73%
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0	0	0%	60.34%
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN	72040.000,00	0	0%	0%

No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahun Lalu (%)
	CAGAR BUDAYA				
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0	0	0%	0%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I (SIRA)

Dari jumlah dana yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kaltim sebesar **Rp. 2.405.595.570.246,00** telah realisasi (SP2D) sebesar **Rp. 294.377.233.843,00** atau **12,24%** sehingga sisa Pagu Anggaran sebesar **Rp. 2.111.218.336.403,00** untuk lebih jelasnya rincian silpa sebagai berikut:

Tabel 17
Sisa Pagu Indikatif APBD Tahun 2026

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Sisa Belanja Operasional	2.111.218.336.403,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2026

BAB IV

PENUTUP

Pelaporan Kinerja ini disusun dan disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur atas penggunaan anggaran Tahun 2026 di Triwulan I dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai momentum awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2026–2029, dokumen ini mengacu pada visi regional "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas" serta tiga pilar utama pembangunan pendidikan nasional yang meliputi perluasan akses, peningkatan mutu, dan penguatan tata kelola birokrasi. Pada aspek operasional dan anggaran, realisasi keuangan dinas hingga akhir Triwulan I baru mencapai Rp294.377.233.843,00 atau sebesar 12,24% dari total pagu belanja operasional yang dialokasikan. Rendahnya penyerapan anggaran ini dipengaruhi oleh karakteristik awal tahun di mana sebagian besar program teknis masih berada pada tahap persiapan administratif, penyusunan rencana aksi, koordinasi lintas sektor, serta proses pengadaan barang dan jasa. Penyerapan anggaran terbesar saat ini terkonsentrasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang mencapai 17,27%, utamanya untuk membiayai belanja rutin seperti gaji pegawai, operasional kantor, dan pelayanan administrasi internal organisasi.

Sementara itu, pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) pada triwulan pertama ini menunjukkan tren yang bervariasi karena sebagian besar program teknis masih mencatatkan realisasi 0%. Di satu sisi, fungsi pelayanan publik dasar berjalan sangat baik yang dibuktikan dengan keberhasilan dinas dalam menindaklanjuti keluhan pengguna layanan hingga 100%. Namun di sisi lain, indikator kinerja makro yang bersifat dampak jangka panjang (outcome)—seperti angka partisipasi sekolah disabilitas, indeks literasi-numerasi siswa SMA/SMK/SLB berdasarkan Asesmen Nasional, kemitraan DUDI, hingga pelestarian cagar budaya—belum menunjukkan hasil karena metrik pengukurannya baru bisa dihitung secara akumulatif pada akhir tahun anggaran. Sebagai langkah tindak lanjut, pihak



manajemen berkomitmen memanfaatkan integrasi aplikasi digital seperti SiPD Dalev, SIRA, dan E-Sakip untuk mempercepat implementasi fisik dan mengoptimalkan pengawasan berkala pada triwulan-triwulan berikutnya.